

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGST		SEPT		OKT		NOV		DES								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN: 25

TAHUN 2007

BILATERAL

RI-Korsel  
Dorong  
Pertumbuhan  
Sektor Energi

**SEOUL (AFP):** Hubungan bilateral Indonesia dan Korea Selatan di bidang energi semakin bersahabat setelah kedua negara menggelar Indonesia-Korea Energy Forum yang pertama di Seoul, Korea Selatan, kemarin.

Forum tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan bilateral Indonesia-Korea di sektor energi dan sumber daya mineral yang telah berlangsung sebanyak 22 kali. Pertemuan terakhir berlangsung di Jakarta pada 4 Desember 2006.

Indonesia-Korea Energy Forum dimaksudkan sebagai forum bagi pelaku-pelaku bisnis kedua negara untuk meningkatkan kerja sama dalam bentuk investasi di sektor energi.

Forum yang difasilitasi kedua pemerintah itu diharapkan kedua belah pihak akan memacu pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor energi.

Dalam forum tersebut, hadir Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia Purnomo Yusgiantoro dan Wakil Menteri Komersial, Industri, dan Energi Korea Selatan Lee Jae-hoon. Berbagai isu dibahas dalam forum itu termasuk isu di bidang minyak dan gas, kelistrikan serta batu bara.

**Penanaman modal**

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno kepada pers di Jakarta, kemarin, mengatakan, sejumlah perusahaan asal Korsel siap menanamkan modal pada proyek-proyek energi dan sumber daya mineral Indonesia yang berlokasi di Sumatra Barat, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Timur. Nilai investasi itu mencapai US\$8,457 miliar.

Dengan proyek itu, Waryono berharap pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral terus berjalan dan ke depan diharapkan dapat lebih memacu ketersediaan energi di dalam negeri.

Di samping itu, investasi asing yang masuk itu juga turut menggerakkan roda perekonomian nasional yang pada akhirnya juga menambah penyerapan tenaga kerja di dalam negeri.

Waryono menambahkan, terkait dengan forum energi di Korsel, delapan proyek telah ditandatangani. Termasuk proyek peningkatan kapasitas kilang Dumai dari 124.000 barel per hari menjadi 200.000 barel/hari dengan nilai investasi US\$150 juta oleh PT Pertamina dan SK Corp. (Ant/I-1)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 40

TAHUN 2007

LUMPUR DI SIDOARJO

# Mengalir sampai Jauh

*Apakah penderitaan 50.000 korban lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur, penting bagi Anda, pembaca? Apakah tenggelamnya rumah-rumah mereka, kampung mereka, bangunan kemasyarakatan mereka, sekolah dan rumah ibadah mereka, penting bagimu bangsa Indonesiaku? Apakah trauma dan keputusan mereka oleh bertele-telanya proses penyelesaian ganti rugi cukup menarik untuk menjadi bagian dari perhatianmu?*

Oleh EMHA AINUN NADJIB

**K**arena aku tahu engkau sendiri menderita. Aku tahu sebagian dari engkau tak kalah menderita. Kita semua bangsa Indonesia menderita, tak memiliki kelegaan dasar sebagai manusia hidup, kecuali para pencuri yang tega hati. Tidak mendapatkan hak-hak dan fasilitas dasar, kecuali para koruptor harta dan nilai. Sehingga muatan jiwa kita sebangsa adalah ketidakrelaan massal, ketidakpercayaan permanen, kecurigaan rutin, kemarahan dan dendam yang tak selalu bisa kita temukan bentuknya, namun kapan saja bisa menggerogoti tali lingkaran nasionalisme, merapuhkan dinding hukum, melelehkan garis-garis keindahan kebudayaan, bahkan memburamkan dan menggelapkan segala macam nilai dan rohani.

Penderitaan massal yang berkepanjangan membuat kita kehilangan kuda-kuda manajemen kecuali untuk keculasan dan keserakahan. Membuat kita kehi-

langan kejernihan berpikir. Tidak siap untuk obyektif. Hati tak kuat untuk melihat keunggulan orang lain. Parameter-parameter nilai terkikis. Perlindungan sistem malah bisa jadi bumerang. Tegaknya hukum malah jadi ancaman.

Jika di Sidoarjo, Lapindo diseret oleh prosedur penegakan hukum, diproses ke pengadilan, maka mereka berhak tidak membayar apa pun kepada korban lumpur "karena kami belum terbukti bersalah". Sementara nyawa para korban sudah tinggal nyantol di urat leher, ketahanan mental mereka tinggal sepersepuluh normal; seluruh sistem nilai dan budaya kehidupan mereka sudah sepegang dan segelap lumpur.

Seharusnya sejak setahun yang lalu kehidupan mereka "digantikan" dengan ukuran kompensasi tertentu. Kalau menunggu pengadilan, mungkin minimal dua tahun hidup mereka terpengang di pengungsian. Kalau Lapindo kalah, bisa empat tahun lagi naik banding.

Dan kalau ternyata pengadilan memutuskan Lapindo tak bersalah, kiamatlah kehidupan korban: dan kematian semacam itu terlalu perlahan-lahan dan terlalu menyakitkan.

Apa mungkin Lapindo menang di pengadilan? Mereka punya bahan hasil penelitian dan analisis geologis ilmiah yang sewaktu-waktu bisa mereka jadikan fakta hukum untuk membuktikan bahwa Lapindo tidak bersalah dalam hal muncrat lumpur di Sidoarjo. Tentu saja akan terjadi perdebatan ilmiah untuk itu di dalam atau di luar pengadilan. Tetapi, tanpa hal itu pun, kemenangan hukum Lapindo di pengadilan lebih dimungkinkan lagi oleh kenyataan yang kekuatannya sepadan dengan hukum alam, yakni bahwa ini adalah Indonesia, hukumnya hukum Indonesia, manusianya manusia Indonesia, budayanya

budaya Indonesia.

Itulah sebabnya, yang berlangsung sangat seret di wilayah lumpur sekarang, sebelum maupun sesudah Presiden turun gunung, adalah proses jual beli, bukan ganti rugi, apalagi ganti untung seperti yang pernah dipidatoken oleh Wakil Presiden di sana. Lapindo melalui PT Minarak Lapindo menyatakan sejauh ini sudah mengeluarkan uang hampir Rp 2 triliun untuk kompensasi sewa rumah korban, kompensasi ganti gaji, transportasi sekolah pelajar, jatah hidup, dan lain-lain. Dan itu semua,

menurut Lapindo, dilaksanakan bukan sebagai kewajiban hukum ataupun moral, melainkan sebagai wujud solidaritas kemanusiaan dan tolong-menolong sesama bangsa.

Lumpur. Lumpur menghancurkan logika. Meremukkan hati nurani. Andaikan karena urgensi situasi mental dan rusuh hatinya para korban yang sudah tinggal sejengkal saja sampai ke batas nyawa, Presiden dan pemerintah *nalangi* dulu memberikan kompensasi kepada korban, kemudian ditagihkan kepada Lapindo, akan terdapat dua kendala.

Pertama, dana apa yang dipakai? Apakah diperkenankan oleh DPR? Berapa lama waktu diperlukan untuk mendapat ridha DPR? Kalau seorang pegawai kantor kecamatan disuruh Pak Camat mengantarkan uang negara ke sebuah desa, lantas di tengah jalan ada orang kecelakaan berat sehingga ia harus menyewa kendaraan untuk mengantarkan ke rumah sakit, kemudian ia terpaksa memberikan jaminan uang agar pasien itu diterima oleh rumah sakit, dan tak ada uang di tangan si pegawai itu kecuali uang amanat Pak Camat, dan karena darurat ia nekat menggunakannya untuk menolong orang kecelakaan tanpa pernah bisa menggantikannya, apakah ada pasal yang bisa melindungi si pegawai ini dari tuduhan korupsi?

Hukum sangat peka dan cerdas untuk mengadili dan menghukum berbeloknya uang. Tapi kalau uang pribadi kita sumbangkan kepada negara melalui pendidikan, santunan sosial, atau kemungkinan-kemungkinan lain, hukum tidak punya pasal untuk memberi *reward* atau bintang jasa. Hukum punya mata sangat tajam kepada keburukan, dan buta tuli terhadap kebaikan.

Kedua, atas dasar apa Presiden menagih Lapindo untuk menggantikan uang yang pemerintah berikan kepada korban lumpur? Apakah nanti para aktivis tidak menuduhnya melakukan fasisme politik ekonomi? Bagaimana kalau Lapindo menolak tekanan itu dan menantang ke pengadilan?



**Bumi muak kepada manusia, menggeliatkan badannya, membatukkan lahar dari hidungnya, memuntahkan lumpur dari mulutnya.**

Lumpur mengalir sampai jauh, menjadi kedung lumpur, danau lumpur, gunung lumpur: bertanyalah kepada para ahli geologi. Tak hanya di Sidoarjo, seluruh bangsa Indonesia sedang berumah dalam lumpur, mandi lumpur, bernapas campur lumpur. ITS menyodorkan gambar kepada saya tentang "rencana" pelebaran lumpur pada hari bulan tahun berikutnya, beberapa desa harus segera dievakuasi, sementara efek sosial dari tahap pertama pembanjiran lumpur sangat belum bisa diatasi.

Mari kita remehkan lumpur di Sidoarjo, tetapi tetaplah bersiap mengalami keterkejutan-keterkejutan besar yang bisa

berskala nasional di masa-masa berikutnya. Bangsa Indonesia sedang berjalan menuju benturan-benturan besar untuk memperoleh perubahan mendasar sampai tingkat jiwa dan nyawa. Kami di Jawa Timur menyebutnya Bangbang Wetan.

Ada air mata SBY, ada Presiden turun gunung, ada *progress* pengambilan keputusan, ada kemacetan pelaksanaan pembayaran lagi dan lagi, ada Presiden marah besar, ada Nirwan Bakri mendadak dipanggil Menteri Sosial, ada pembengkakan ketidakpercayaan korban, ada potensi anarki dan kerusuhan, di sana ada Bakri Group yang siapa pun tak bisa membuktikan bahwa ia berkaitan dengan Lapindo, ada Caymon Island, ada Solidaritas Rakyat Sidoarjo untuk Korban Lumpur.

Tapi putus asa itu bodoh dan haram. Perwakilan 10.476 keluarga sekitar 45.000 orang yang mau menerima DP 20 persen yang menyuruh saya jadi penyampai hati mereka, 16 peng-

usaha pabrik GPKL (Gabungan Pengusaha Korban Lumpur), teman-teman pengungsi di Pasar Porong yang menuntut DP 50 persen (sebagian lain lagi yang tidak menyuruh saya apa-apa, menuntut 100 persen, juga sejumlah aktivis menghujat sampai 300 persen bahkan 500 persen), pemuka-pemuka PT Minarak Lapindo Jaya, tentu saja juga teman-teman BPN dan BPLS, menyatakan kalimat yang sama kepada saya: "Kami ingin masalah ini segera beres, jangan tinggalkan kami dulu."

Saya berteman dengan semuanya. Saya bersaudara dengan semuanya. Semua pihak yang "bertikai" itu sama-sama "kita" dalam konsep saya. Kalaupun ada "kami" dan "mereka", itu soal teknis. Bumi muak kepada manusia, menggeliatkan badannya, membatukkan lahar dari hidungnya, memuntahkan lumpur dari mulutnya. Muntahan lumpur di area Kerajaan Kahuripan itu dikawal di sebelah barat oleh Kiai Sudrun, oleh Kiai Chamid

di sebelah timur.

Saya mendapat SMS tak bernomor pengirim, tapi saya merasa itu dari Mbah Dul Pasar bersama Yai Sahlan, yang *nyulisnya* di HP pasti dibantu Ning Nur atau Gus Nuriman: "Kumpulkan rakyat Sidoarjo di alun-alun. Ajak naik panggung pemimpin-pemimpin korban lumpur, bupati, pejuang-pejuang BPLS dan ITS, Nirwan Bakri, Andi Darussalam, Wiwid, serta semua pihak yang bekerja keras dalam penderitaan itu. Junjung dan angkat mereka menjadi Pahlawan Kemanusiaan".

Saya balas: "Lho, kok, Lapindo jadi pahlawan?"

Dijawab: "Bikin rujak cing syaratnya harus pakai cing kambing, lontong, kangkung, tahu tempe, petis, lombok, dan lain-lain. Kalau unsur-unsur itu tidak dipenuhi, ya ndak jadi rujak. Jadi pahlawan juga syaratnya harus pakai 'cingur', 'tahu temp' 'kangkung'...."

EMHA AINUN NADJ  
Budayaw



JITET

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2007



**KORBAN LUMPUR DISUMPAH** – Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Choiron (tengah) memimpin pengucapan sumpah massal para korban lumpur panas Lapindo Brantas tentang luas tanah dan bangunan yang dimiliki secara benar, sebagai syarat utama proses verifikasi, di pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (25/7).  
Investor Dailyfont

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 3

TAHUN 2007



MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 17

TAHUN 2007

**RI-KORSEL**

**Target  
Perdagangan  
dan Investasi  
Bisa Tercapai**

SEOUL, KOMPAS — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono optimistis target pencapaian dua kali lipat nilai investasi dan perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan hingga tahun 2012 dapat terwujud. Alasannya, nilai perdagangan selama lima tahun terakhir ini telah mencapai dua kali lipatnya.

Demikian Presiden Yudhoyono saat memberikan penjelasan mengenai hasil kunjungan di Korsel kepada pers yang menyertai perjalanannya sejak dari Jakarta, Rabu (25/7) di hotel tempatnya menginap di Seoul, Korsel. Presiden didampingi sejumlah menteri, pimpinan lembaga negara, dan anggota DPR yang menjadi anggota rombongan.

"Nilai perdagangan kita selama tahun 2002 misalnya, sebesar 5,7 miliar dollar AS. Pada tahun 2006, nilainya sudah mencapai dua kali lipat, atau 10,7 miliar dollar AS," ujar Presiden.

Dengan kecenderungan yang sama, lanjut Presiden, apalagi ditambah Pemerintah Korsel dan

Indonesia juga memberikan berbagai fasilitas dan dorongan-dorongan, maka harapan Indonesia, nilai investasi dan perdagangan akan dapat dicapai. "Maka, tahun 2012 nilai perdagangan akan bisa mencapai nilai perdagangan sampai 21 miliar dollar AS lebih," lanjut Presiden.

Untuk mempercepat target pencapaian itu, Presiden Yudhoyono menambahkan, selain mendorong peningkatan investasi minyak dan gas, sektor lain seperti kerajinan tangan dan lainnya juga harus dipacu.

"Saya ingin setelah dari Korsel ini, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian bekerja keras membuat lebih beragam komoditas yang dipasarkan dalam kerja sama Indonesia-Korsel ini," kata Presiden.

Bersama Perdana Menteri Republik Korea Han Duck-Soo, Presiden Yudhoyono menyaksikan penandatanganan 12 kesepakatan bisnis antara Indonesia dan Korsel. Penandatanganan dilakukan dalam acara Forum Bisnis dan Energi Indonesia-Korsel, yang baru pertama kalinya diselenggarakan.

Dari 12 kesepakatan itu, satu di antaranya merupakan kerja sama bilateral di bidang pembangunan infrastruktur yang ditandatangani Menko Perekonomian Boediono dan Menteri Perencanaan dan Anggaran Korea Ho In Kang. (SUHARTONO)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 3

TAHUN 2007

# BK Persoalkan Kunker Komisi VII

**JAKARTA (SINDO)** – Kunjungan kerja (kunker) enam anggota Komisi VII DPR ke Jepang dan Korea menuai protes di kalangan anggota dan pimpinan DPR.

Kunker dalam rangka meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) itu diduga menggunakan alokasi dana yang diberikan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Kusmayanto Kadiman sebagai mitra kerja DPR. Padahal, dalam aturan tata tertib (tatib) DPR, hal itu tidak diperkenankan. Selain itu, kunker tersebut dilakukan secara diam-diam, tanpa sepengetahuan pimpinan DPR.

Ketua DPR Agung Laksono menyatakan, pihaknya tidak akan memberikan toleransi kepada anggota DPR yang melakukan kunjungan ke luar negeri dengan menggunakan dana milik eksekutif. Menurut dia, hal itu merupakan bentuk pelanggaran tatib DPR. "Kita tidak akan menoleransi adanya kunjungan ke luar negeri dengan menggunakan biaya milik pemerintah atau menggunakan dana eksekutif," tegas Agung di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, enam anggota Komisi VII DPR, yakni Agusman Effendi (Ketua Komisi

VII), M Najib, Tjatur Sapto Edy, Zulkifliemansyah, Tamam Achda, dan Zaenuddin Amali diketahui ikut bergabung dalam studi banding PLTN yang dilakukan Menristek Kusmayanto Kadiman, ke Korea dan Jepang.

Kunjungan tersebut sempat disayangkan oleh sejumlah anggota DPR karena terkesan dilakukan secara diam-diam. Bahkan, salah seorang anggota Komisi VII DPR, Alvin Lie, menilai kunjungan tersebut berpotensi mempengaruhi netralitas dan independensi DPR, terkait kebijakan pembangunan PLTN di Muria, Kudus, Jawa Tengah.

Ketua DPR mengatakan, dana kunjungan ke luar negeri saat ini masih tersedia. Menurut dia, DPR telah menganggarkan dana kunjungan ke luar negeri baik untuk kunjungan kerja (kunker) maupun studi banding. "Jadi jelas, tidak boleh bila ada anggota DPR pergi ke luar negeri dengan menggunakan dana eksekutif," tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Gayus Lumbuun meminta anggota DPR yang ikut kunjungan Menristek ke luar negeri segera membuat klarifikasi ke publik. "Sebaiknya mereka menjelaskan ke publik, kenapa mereka ikut rombongan Menristek ke luar negeri," ujarnya.

Gayus mengatakan, keikutsertaan anggota DPR dalam kunjungan seorang pejabat eksekutif, bisa memicu kecurigaan publik. Sebab, DPR merupakan lembaga pengawas kinerja eksekutif. "Kalau lembaga pengawas dan yang diawasi melakukan kunjungan ke luar negeri secara bersama-sama, tentu publik akan bertanya-tanya ada apa di balik peristiwa itu," tukasnya.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy, yang ikut dalam rombongan kunker, membantah jika kunjungannya ke Korea Selatan (Korsel) bersama Menristek merupakan kunker. Dia mengaku, kehadirannya bersama lima anggota Komisi VII lainnya merupakan undangan pemerintah. "Kami diundang, ini ada surat resminya dari Setneg," ungkapnya.

(suwarno/chamad hojin)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN			FEB			MAR			APR			MEI			JUN			JUL			AGST			SEPT			OKT			NOV			DES		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					

HALAMAN : 3

TAHUN 2007

## Ke Korsel dan Jepang Disponsori Menristek BK DPR Usut Kunjungan Kerja

**JAKARTA (Media):** Badan Kehormatan (BK) DPR segera mengusut kepergian anggota Komisi VII ke Korea Selatan (Korsel) dan Jepang.

"Apalagi kepergiannya menggunakan dana sosialisasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dan disponsori Menristek (Menteri Riset dan Teknologi) Kusmayanto Kadiman," kata Wakil Ketua BK DPR Gayus Lumbuun (F-PDIP) di Gedung MPR/DPR, Jakarta, kemarin.

Menurut Gayus, kalau kepergian anggota Komisi VII itu atas biaya mitra kerja DPR, hal itu menyalahi aturan dan Tata Tertib DPR. Apalagi kalau kepergian mereka atas laporan dan pengaduan masyarakat. Kecuali studi banding itu menggunakan anggaran DPR.

Sejken Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang akan melaporkan studi banding itu ke BK DPR karena studi banding oleh anggota Komisi VII yang terga-

bung dalam Kaukus Nuklir sebelumnya dalam rapat kerja dengan Menristek Kusmayanto Kadiman tidak diagendakan.

"Ini bisa dikatakan kepergian mereka itu adalah perjalanan liar," kata Sebastian.

Sebelumnya, anggota Komisi VII Alvin Lie mengakui, dirinya mendapat SMS dari Menristek Kusmayanto Kadiman bahwa anggaran sosialisasi PLTN digunakan untuk memberangkatkan beberapa anggota Komisi VII DPR yang tergabung dalam Kaukus Nuklir DPR, tokoh masyarakat, dan lain-lain untuk lebih mengenal pro-kontra PLTN.

Alvin juga menyayangkan tindakan Menristek membiayai kegiatan anggota Komisi VII DPR yang tidak transparan itu. Hal itu memengaruhi independensi dan

netralitas anggota terkait dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Khususnya mengenai rencana pembangunan PLTN di Semenanjung Muria.

"Hal ini bisa jadi konflik kepentingan juga karena anggota Komisi VII DPR berwenang mengalokasikan anggaran untuk Kementerian Ristek," katanya.

Beberapa nama anggota Komisi VII yang ikut studi banding ke Korsel itu di antaranya, Agusman Effendi dan Zainudin Amali (F-PG), Tjatur Sapto Edy dan M Najib (F-PAN), Zulkieflimansyah (F-PKS) dan Tamam Achda (F-PPP). Mereka diberangkatkan dalam dua gelombang, yakni ke Korsel pada 21-25 Juli dan ke Jepang pada 29 Juli-2 Agustus.

### Tidak boleh

Ketua DPR Agung Lakoso menyatakan, DPR tidak akan menoleransi adanya proses kerja atau program kunjungan ke luar negeri anggota Dewan yang dibiayai pemerintah.

Ia melanjutkan, apabila ditemukan indikasi, kepergian anggota Komisi VII ke Korsel dan Jepang, akan ada tindak lanjut dari DPR.

Anggota F-PKS Zulkieflimansyah mengakui, kepergian anggota dewan itu atas undangan Menristek. "Tapi kami tidak tahu sumber dananya seperti apa. Saya hanya ditugaskan oleh Poksi untuk mengikuti sosialisasi mengenai nuklir atas undangan Menristek," kata Zulkieflimansyah dari Korsel kepada *Media Indonesia*.

Karena itu, tambahanya, masalah pertanggungjawaban dana seharusnya dimintakan kepada Menristek. Ia melihat sosialisasi ke Korsel dan Jepang tidak hanya untuk anggota DPR, melainkan juga masyarakat dan pemuka agama di sekitar tempat pembangunan PLTN di Semenanjung Muria.

"Kalau saya lihat, proses sosialisasi ini bagus. Masyarakat bisa lihat langsung fasilitas nuklir yang sudah berjalan dan efeknya bagi masyarakat sekitarnya." (Far/Ant/P-2)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN : 2

TAHUN 2007

## Pemerintah Biayai Perjalanan DPR ke Korsel dan Jepang

[JAKARTA]Di tengah maraknya aksi penolakan masyarakat atas rencana pemerintah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Semenanjung Muria, Jepara, Jawa Tengah, pimpinan dan beberapa anggota Komisi VII DPR disponsori pemerintah ke luar negeri.

Mereka antara lain Ketua Komisi VII Agusman Effendi (FPG), Zainudin Amali (FPG), Ketua Kaukus Nuklir DPR M Najib (FPAN), Tjatur Saptoedy (FPAN), Zulkiflimansyah (FPKS), dan Tamam Achda (FPPP).

Kepergian mereka atas undangan Menristek Kusumayanto Kadiman, dibagi dua gelombang, Korea Selatan (21-25 Juli), dan Jepang (29 Juli-2 Agustus). Menurut informasi, keberangkatan para anggota dewan yang tergabung dalam kaukus Nuklir DPR itu menggunakan dana sosialisasi PLTN.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Alvin Lie (FPAN), dan Sultan Bhatoegana (FPD), Selasa (24/7) mengatakan keberangkatan sejumlah anggota Komisi VII itu tidak pernah diinformasikan, apalagi dirapatkan di Komisi VII sendiri.

Tapi Alvin menyebut, mendapat pesan singkat (SMS) dari Menristek soal penggunaan anggaran sosialisasi PLTN. Dalam pesan singkatnya disebutkan sebagian anggaran sosialisasi PLTN digunakan untuk memberangkatkan beberapa anggota Komisi VII DPR yang tergabung dalam Kaukus Nuklir DPR, serta tokoh-tokoh masyarakat, serta LSM, untuk lebih mengenal PLTN.

Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2006, diatur anggaran sosialisasi pembangunan PLTN Muria sebesar Rp 5 miliar. Namun, masyarakat pemilik lahan yang akan digunakan sebagai PLTN belum pernah mendapat sosialisasi. Itu terungkap pada kunjungan Ketua Komisi VII DPR Sony Keraf (FPDI-P), dan Alvin Lie ke Desa Balong, Jepara, Senin (23/7).

Sony Keraf mempertanyakan studi Amdal dari rencana pembangunan PLTN Muria. Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Gayus Lumbuun mengatakan bahwa perjalanan anggota DPR ke luar negeri atas biaya mitra kerja tidak bisa dibenarkan, karena bisa menyebabkan bias fungsi pengawasan yang dilakukan DPR. "Kepergian anggota DPR harus menggunakan anggaran sendiri, atau atas undangan pihak luar negeri. Tapi kalau dari departemen yang menjadi mitra kerja, ada konflik kepentingan," ucapnya. [B-14]

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2007

# RI-Korsel Teken Kesepakatan

## Pemerintah Korsel merespons baik penanganan masalah TKI.

SEOUL — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan PM Republik Korea, Han Duck-soo, menyaksikan penandatanganan 12 kesepakatan antara Indonesia dan Korea Selatan (Korsel). Kedua negara juga menyepakati kerja sama di 11 bidang.

Di sela-sela acara Forum Bisnis dan Energi Korsel-Indonesia, satu dari 12 kesepakatan itu adalah kerja sama bilateral di bidang pembangunan infrastruktur. Kesepakatan ini diteken Menko Perekonomian, Boe-

diono, dengan Menteri Perencanaan dan Anggaran Korsel, Ho In-kang.

Tiga kesepakatan lainnya adalah kerja sama untuk kawasan ekonomi khusus antara Batam Industrial Development Industry (BIDA) dan Incheon Free Economic Zone; pembangunan *dry port* Cikarang antara Jababeka Infrastruktur dan Saman Co (Korsel) serta Itochu Corporation (Jepang); dan pembangunan kapal laut antara C & Group Heavy Industry dan PT Dok Perkapalan Koja Bahari.

Delapan kesepakatan lainnya merupakan kerja sama di bidang energi dan sumber daya mineral senilai 8,457 miliar dolar AS. Menurut SBY, Indonesia dan Korsel juga menetapi 11 bidang yang akan digarap ber-

” Pada 2012 nilai perdagangan mencapai 21 miliar dolar AS. ”

Susilo Bambang Yudhoyono  
Presiden RI

sama.

Kesepakatan itu merupakan bagian dari pernyataan bersama (*joint statement*) yang diteken menteri luar negeri kedua negara usai pertemuan bilateral dengan Presiden Roh Moo-hyun, Selasa (24/7).

## 12 KESEPAKATAN Indonesia-Korsel

- Kawasan ekonomi khusus antara Batam dan Incheon Free Economic Zone.
- Pembangunan *dry port* Cikarang antara Jababeka dan Saman Co (Korea) serta Itochu Corporation (Jepang).
- Pembangunan kapal laut antara C & Group Heavy Industry dan PT Dok Perkapalan Koja Bahari.
- *Revamping* kapasitas kilang. Pertamina dengan SK Corporation.
- Pemakaian merek dagang bersama. Pertamina dengan SK Energy.
- Kerja sama operasi pada E&P Projects di Shiarak Area Sumatra. Pertamina dengan KNOG dan SK Corporation.

- Kajian stasiun pengumpul LNG di Pulau Jawa. Pertamina (Pertagas) dengan Korea Gas Corporation (Kogas).
- Pemasaran produk *natural gas to liquid* (NGL). Pertagas dengan E1.
- Pelabuhan internasional di Tanjung Api-api Sumsel. Petras Indonesia dengan The Korean Consortium.
- Pabrik pencairan batubara di Kaltim, Nuansa Cipta Coal Investment dengan Kenertec Co, Posco Engineer & Construction Co Ltd dan Samsung Securities.
- Perawatan rel kereta api pengangkut batubara di Kaltim. Pemda Kaltim, PT KAI, PT Nuansa Cipta Coal Investment dengan Kenertec Co, Posco Engineering & Construction Co Ltd.
- PLTU batubara di Mulut Tambang Sumsel. PLN, PT Rajawali Koresia Konsorsium, Hanwha Engineering & Construction Co, Korea Western Power Co Ltd.

## 11 BIDANG KERJA SAMA

- Perdagangan dan investasi
- Pariwisata
- Infrastruktur
- Energi alternatif
- Eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas
- Kehutanan, bioteknologi
- Pertahanan
- Tenaga kerja
- Sistem peringatan dini bencana
- Riset dan kajian PLTN
- Informasi teknologi, termasuk *e-government* dan *e-business*

ANTARA



"Hasil pertemuan itu menetapkan 11 sasaran atau target yang kami bertekad untuk mencapainya," kata SBY, Rabu (25/7) di Seoul.

Sebelas sasaran yang disepakati itu adalah menggandakan nilai perdagangan dan investasi kedua negara pada 2012. "Saya optimistis hal ini bisa dicapai."

Keyakinannya itu didasarkan pada terus menguatnya nilai perdagangan Indonesia-Korsel. Pada 2002 saja, nilainya 5,7 miliar dolar AS. Dan pada 2006,

sudah mencapai 10,7 miliar dolar AS.

"Dengan berbagai fasilitas dan dorongan dua pemerintah, harapan kita itu bisa dicapai, sehingga pada 2012 nilai perdagangan mencapai 21 miliar dolar AS," jelas SBY.

Kerja sama bidang pariwisata juga akan dilipatduakan, khususnya mendatangkan turis Korsel ke Indonesia. "Kita juga setuju kerja sama di bidang kehutanan, bioteknologi, termasuk proyek percontohan penghutanan kembali dan mekanisme pembangunan lingkungan hidup," jelasnya.

Menurutnya, kerja sama di bidang ini penting guna menjaga kelestarian hutan, sehingga ekosistem terjaga, sekaligus mengatasi perubahan iklim global.

SBY juga menjelaskan keseriusan Pemerintah Korsel menangani masalah TKI. "Presiden Roh merespons baik peningkatan pelayanan dan perlakuan terhadap TKI." ■ ant/osa

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 24

TAHUN 2007

# Ganti Rugi Tuntas Bulan Puasa

## 500 Warga Korban Lumpur Lapindo Disumpah Berkait Luas Tanah dan Bangunan

SEOUL, KOMPAS — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan Badan Pelaksana Penyelesaian Lumpur Sidoarjo dan Lapindo Brantas Inc untuk mempercepat penyelesaian pembayaran uang muka ganti rugi kepada warga Desa Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.

Dalam keterangan pers di akhir kunjungannya ke Korea Selatan, Rabu (25/7) sore di Seoul, Presiden menegaskan agar penyelesaian pembayaran uang muka ganti rugi 20 persen harus dituntaskan sebelum berakhirnya bulan puasa. Hal ini dimaksudkan agar tidak muncul masalah-masalah sosial di masyarakat korban lumpur panas.

Menurut Presiden Yudhoyono, instruksi itu telah diberikan di

Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, sebelum meninggalkan Tanah Air.

"Saya sampaikan ke Wapres Muhammad Jusuf Kalla dan para menteri agar betul-betul dilakukan langkah konkret terkait ganti rugi pembayaran korban Lapindo. Yang saya inginkan adalah betul-betul sebelum akhir Ramadhan pembayaran 20 persen kepada penduduk korban lumpur sudah tuntas," tandasnya.

Menurut Presiden, kemajuannya diakui sudah cukup baik. "Akan tetapi, saya ingin betul-betul dananya mengalir. Dengan demikian proses verifikasi, pembayaran, dan penerimaan dana betul-betul tepat waktu dan tepat sasaran, sehingga bisa menyelesaikan masalah sosial di Sidoarjo," ujar Presiden menambahkan.

Presiden mengatakan, setiap tiga hari sekali pihaknya selalu melakukan pengecekan kemajuan dan proses penyelesaiannya.

### Disumpah

Dari Sidoarjo dilaporkan, 500 korban lumpur Lapindo dari Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera 1, kemarin, disumpah sesuai agama masing-masing. Pengambilan sumpah oleh para

pimpinan agamanya itu dilaksanakan dalam dua gelombang di Pendapa Kabupaten Sidoarjo.

Setiap warga yang akan melakukan sumpah diberikan surat pernyataan di bawah sumpah yang harus diisi warga terkait luas tanah dan bangunan. Di bagian bawah formulir disebutkan, apabila pernyataan yang dibuat tidak benar, pemilik bersedia menerima hukuman dari Tuhan.

Prosesi sumpah itu dipandu oleh Emha Ainun Najib alias Cak Nun, yang berkali-kali mengingatkan para korban lumpur untuk tidak berbohong soal luas tanah dan bangunan yang akan dimintakan ganti rugi.

Cak Nun juga sempat memanggil Direktur Operasional PT Minarak Lapindo Jaya Bambang Prasetyo Widodo dan bertanya

kepadanya terkait komitmen Lapindo. Bambang pun menjawab, "Lapindo akan membayar sesuai klaim masyarakat." Warga kemudian bertepuk tangan sambil berteriak "Allahu Akbar" setelah mendengar pernyataan tersebut.

"Sumpah ini merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan luas bangunan. Kalau tidak, masalah ini tidak akan selesai bertahun-tahun," ujar Cak Nun kepada warga.

Ketua Tim Verifikasi Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo Yusuf Purnama mengatakan, sumpah merupakan jalan terakhir ketika selang pendapat tentang luas bangunan, khususnya bangunan tanpa izin mendirikan bangunan tak kunjung usai. (HAR/APA)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 4

# Strategi Energi

TAHUN 2007

## China: Amankah?

Oleh  
**ADI HARSONO**

**D**alam sebuah diskusi di Beijing bersama para pakar dari suatu lembaga strategis China empat tahun lalu, diajukan pertanyaan: berapa lama Tentara Pembebasan China (PLA) dapat mengendalikan keadaan di Selat Taiwan dan menguasai pulau Taiwan bila provinsi itu menyatakan kemerdekaannya lepas dari RRC?

Tanpa meneliti data jumlah dan kecanggihan mesin tempur PLA ataupun jumlah tentaranya, bisa dipastikan PLA butuh 30 hari untuk menaklukkan Taiwan, dan bila itu terjadi maka China pasti kalah perang. Kenapa? Disebabkan cadangan minyak strategis di China saat ini masih di bawah 20 hari. Di atas kertas, bila perang berkepanjangan menjadi lebih dari 20 hari, mesin perang PLA sudah kehabisan bahan bakar.

Walaupun ini adalah simulasi perang yang konyol, tapi diskusi ini membuat pimpinan China sadar bahwa cadangan strategis minyak mentah merupakan masalah amat penting. Lalu apa yang perlu dilakukan? Berapa banyak cadangan yang dianggap aman? Mampukah China mewujudkannya?

### Penemuan Baru

10 Mei 2007 yang lalu, dunia perminyakan dikejutkan oleh berita pengumuman CNPC (China National Petroleum Corporation) tentang penemuan ladang minyak terbesar di Lapangan Minyak Nanpu, pesisir Teluk Bohai, 120 km di timur kota Beijing, harga minyak dunia pada perdagangan hari itu langsung turun US\$1 di NYSE, dan saham Petrochina melonjat.

Ladang yang diperkirakan mengandung lebih dari 7.35 milyar barel (1 milyar ton) minyak ini merupakan hasil eksplorasi selama 40 tahun. Ini merupakan berita luar biasa bagi rakyat, penting untuk mendukung ekonomi China, karena kini tidak banyak lagi temuan ladang minyak sebesar itu,

ditambah harga minyak dunia yang makin tinggi.

Akan tetapi walaupun penemuan ladang minyak Nanpu mempunyai arti penting untuk meningkatkan cadangan aman China, dia tetap tidak mengubah kebutuhan jangka menengah dan jangka panjang yang dapat mengubah strategi cadangan energi China, yang tentunya juga tidak akan berpengaruh banyak kepada harga minyak dunia.

Sebelumnya, sisa cadangan minyak yang bisa diproduksi hanyalah 15 milyar barel (2.1 milyar ton). Tapi konsumsi minyak rata-rata penduduk masih di bawah rata-rata dunia. Pada tahun 2005 konsumsi rata-rata China hanyalah 242 kg, dunia 590 kg, sebagai pembanding Amerika adalah 3 ton dan Jepang 2 ton. Produksi minyak mentah China pada tahun 2006 adalah 184 juta ton, naik 1,7% dibanding tahun 2005. Impor minyak 63 juta ton, naik 19,6%. Di antaranya impor minyak mentah 139 juta ton, naik 16,9%. Minyak impor memasok 47% dari total kebutuhan di China, naik 4,1% dibanding tahun lalu. Ini tentu membuat China rentan terhadap perubahan harga minyak dunia.

Dibanding konsumsi tahun 2006 yang mencapai 347 juta ton, 1 milyar ton yang ditemukan di Nanpu tidaklah banyak. Produksi tahunan dari Nanpu sampai tahun 2012 baru bisa mencapai 100 juta ton, namun menurut perkembangan permintaan sekarang, diperkirakan pada tahun 2012, China masih perlu mengimpor 55% kebutuhan minyaknya. Dengan kata lain bila kebutuhan rata-rata penduduk China mencapai tingkat dunia, maka China membutuhkan 640 juta ton minyak mentah.

Bila produksi tahunan China masih bertahan pada 180 juta ton, ini berarti ketergantungan China pada minyak impor akan mencapai 72%, melebihi kondisi minyak impor Amerika sekarang yang mencapai 63%. Oleh sebab itu kondisi keamanan minyak China masih sangat lemah, ketergantungan pada minyak impor yang semakin besar harus membuat Beijing memikirkan strategi baru. Bila cada-

73

ngannya cukup, China bisa mempertahankan perkembangan ekonominya yang sehat dan berimbang.

#### **Cadangan Strategis**

Sesuai rencana pemerintah, China akan mempertahankan cadangan minyak strategisnya ekuivalen dengan 30 hari jumlah impor pada tahun 2010. Rencana ini akan dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, 10-12 juta ton minyak akan disimpan, sedangkan tahap ke dua dan ke tiga menjadi masing-masing 28 juta ton, semuanya disimpan di empat tempat yang diputuskan sejak 2003, yaitu: Zhenhai dan Zhoushan di Provinsi Zheji-ang, Dalian di Provinsi Liaon-ing, dan Huangdao in Provinsi Shandong.

Apakah cadangan 30 hari sudah aman? Dibandingkan negara-negara maju yang mencapai 90 hari, angka itu jauh dari cukup. Tapi untuk mencapai 90 hari diperlukan modal terlalu besar, bagaimana pun China masih negara berkembang, belum mampu melakukannya tanpa mengganggu sektor industri yang lain. Sebetulnya pengadaan cadangan strategis apakah itu 30 hari atau 90 hari jumlah impor, semuanya untuk menjamin keamanan pengadaan minyak, yang banyak tergantung pada konsumsi dan tingkat impor.

Pertanyaannya, apakah China mempunyai cukup dana? Cadangan devisa China sampai akhir kwartal pertama 2007, mencapai US\$ 1,202 triliun, naik 37.36% dari tahun lalu. Bila mengikuti permintaan cadangan 90 hari minyak impor, dengan harga minyak mentah dunia US\$ 60 per barel, diperlukan dana US\$17 milyar. Bila harga minyak US\$70, dibutuhkan US\$20 milyar. Jumlah tersebut tidak banyak bagi China, pengeluaran ini juga dapat mengurangi tekanan pada sistem moneter karena risiko kelebihan cadangan devisa. Pembelian di luar China juga berarti mengubah cadangan devisa menjadi cadangan kepemilikan sumber alam dan energi, tapi dampak negatif dari strategi investasi di luar China akan memicu persaingan global yang pada akhirnya akan mendongkrak harga-harga sumber

alam dan minyak.

Di samping itu, besaran cadangan minyak strategis masih ditentukan oleh harga minyak dunia. Harga US\$ 60 per barel, masih dianggap "kemahalan". Tapi rasanya tidak mungkin harga minyak kembali berada di bawah US\$50 per barel. Jadi, kalau memang ada uang, pilihan terbaik adalah meningkatkan cadangan minyak menjadi 90 hari.

Menurut peraturan International Energy Agency (IEA), yang bisa menjadi anggota hanyalah negara yang telah mempunyai cadangan minyak di atas 90 hari, bahkan negara anggota seperti Jepang dan Korea sudah melebihi angka itu. Bagi China, di samping rasa nyaman, mencapai angka 90 hari itu juga berarti lebih cepat menjadi anggota IEA. Manfaatnya tentu saja banyak, karena dengan menjalin kerjasama internasional, China dapat membangun sistem ketahanan energinya, dan peringatan dini bila terjadi krisis minyak, sehingga bisa mengambil tindakan antisipasi bertahap untuk mengurangi dampak terhadap ekonomi.

#### **Kesimpulan**

China perlu mempercepat program cadangan strategis minyaknya menjadi 90 hari, rencana 30 hari pada 2010 dianggap terlalu lambat, ini tidak mendukung perkembangan pesat ekonomi dan kemungkinan perubahan geopolitik di kawasan Asia terutama Selat Taiwan.

Penemuan lapangan minyak 1 milyar ton di Nangpu adalah sesuatu yang perlu disyukuri tapi tetap tidak cukup untuk menopang kebutuhan energi China.

Reformasi bidang energi perlu dipercepat. Monopoli 4 perusahaan minyak BUMN (Sinopec, PetroChina, CNPC dan CNOOC) perlu dipangkas agar mekanisme pasar energi di dalam China lebih hidup dan tanggung jawab cadangan minyak bisa didistribusikan kepada daerah-daerah dengan resiko dan biaya yang lebih rendah

*Penulis adalah Ketua IBAS di Shanghai.*

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 10

TAHUN 2007

TRANSAKSI DAGANG

## Pengaruh Bursa Regional Lemahkan Indeks

JAKARTA (Suara Karya): Perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta (BEJ) Rabu ditutup dengan penurunan indeks harga saham gabungan (IHSG) 6,759 poin (0,27 persen) menjadi 2.394,565 karena sentimen negatif dari penurunan di bursa regional.

Menurut analis pada PT Bapindo Bumi Sekuritas Harry Kurniawan, penurunan di bursa Wall Street pada Selasa memengaruhi hampir semua bursa di kawasan, termasuk BEJ.

Diawali dengan indeks Nikkei di Jepang yang turun 0,59 persen kemudian disusul indeks Hang Seng di bursa Hong Kong turun 0,47 persen dan bursa lainnya.

Indeks Dow Jones turun 0,97 persen, indeks Nasdaq turun 1,78 persen

dan indeks S&P turun 1,5 persen. Sejak awal perdagangan IHSG bergerak di teritori negatif, sempat menyentuh level terendah 2.382,460 sebelum kemudian naik lagi dan ditutup pada 2.394,565.

Pasar lebih didominasi perdagangan saham-saham lapis kedua. Seperti PT Bakrieland (ELTY), Bakrie and Brothers (BNBR), Bank Internasional Indonesia (BNI), Bumi Resources (BUMI), sehingga volume perdagangan cukup tinggi mencapai 5,4 miliar saham dengan nilai Rp 4,6 triliun.

Mengenai perdagangan esok hari, menurut Harry Kurniawan, sentimen domestik saat ini adalah laporan kinerja emiten pada kuartal kedua atau semester pertama tahun

2007, dan saat ini pasar sedang menunggu laporan kinerja sejumlah saham unggulan, seperti Bank Mandiri (BMRI) dan sejenisnya.

Pada perdagangan Selasa, saham-saham yang mengalami penurunan antara lain Astra Internasional (ASII) turun Rp 600 menjadi Rp 18.850, Telkom (TLKM) turun Rp 50 menjadi Rp 10.950, Bumi Resources (BUMI) turun Rp 25 menjadi Rp 2.725, sedangkan saham yang naik antara lain Medco International (MEDC) naik Rp250 menjadi Rp 4.500, Bank Central Asia (BCA) naik Rp 100 menjadi Rp 6.400 dan Perusahaan Gas Negara (PGAS) naik Rp 100 menjadi Rp 9.450.

Selasa lalu, indeks untuk pertama kalinya me-

nembus level psikologis baru 2.400. Sayangnya, berdasarkan data, 70 persen transaksi masih dikuasai asing, yang bisa sewaktu waktu melarikan portofolionya ke negara lain.

Melejitnya indeks BEJ terdorong oleh hasil kinerja emiten pada semester pertama 2007, terutama sektor perbankan.

Dominasi asing dalam transaksi di BEJ itu amat riskan bagi perekonomian Indonesia. Karena jika investor asing melepas saham-saham mereka dari bursa Indonesia, maka harga saham akan anjlok dan ekonomi nasional rentan goyah.

Terlebih, total nilai investasi asing di BEJ itu hanya satu persen dari seluruh portofolio mereka di seluruh dunia. (Agus/Nunun/Ant)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 16

TAHUN 2007

## LAWATAN MANCANEGERA RI-Korea Teken Dua Belas Kesepakatan

SEOUL (Suara Karya): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Republik Korea Han Duck-Soo menyaksikan penandatanganan nota 12 kesepakatan kedua negara, Rabu, di sela acara forum bisnis dan energi RI-Korea. Satu di antara 12 kesepakatan itu merupakan kerja sama bilateral menyangkut pembangunan infrastruktur yang ditandatangani Menko Perekonomian Boediono dan Menteri Perencanaan dan Anggaran Korsel Ho In Kang.

Sementara tiga kesepakatan lain adalah kerja sama untuk kawasan ekonomi khusus antara Batam Industrial Development Authority (BIDA) dan Incheon Free Economic Zone, kerja sama pembangunan "dry port" Cikarang antara Jababeka Infrastruktur dan Saman Co (Korea) serta Itochu Corporation (Jepang), juga kerja sama pembangunan kapal laut antara Heavy Industries dan PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari.

Delapan kesepakatan lain menyangkut kerja sama di bidang energi dan sumber daya mineral senilai 8,457 miliar dolar AS. Kedelapan kesepakatan itu masing-masing kerja sama PT Pertamina dan SK Corporation mengenai *revamping* kapasitas

kilang dari 124.000 barel menjadi 200.000 barel per hari di Dumai, Sumsel; kerja sama PT Pertamina dan SK Energy untuk pemakaian merek dagang bersama dalam memasarkan produk pelumas; kerja sama PT Pertamina dan KNOC bersama SK Corporation dalam operasi E&P Projects di Shiarak Area, Sumatera.

Kesepakatan lain menyangkut kerja sama PT Pertamina (Pertagas) dan Korea Gas Corporation (Kogas) dalam kajian pembangunan stasiun pengumpul LNG di Pulau Jawa, kerja sama PT Pertagas dan E1 dalam pemasaran produk *natural gas to liquid* (NGL) di Sumsel, kerja sama PT Petras Indonesia dan The Korean Konsorsium yang diwakili Innet Company tentang pembangunan pelabuhan internasional di Tanjung Api-api, Sumsel; kerja sama PT Nuansa Cipta Coal Investment dengan Kenertec Co, Posco Engineer & Construction Co Ltd dan Samsung Securities menyangkut operasional pembangunan pabrik pencairan batu bara di Kaltim, serta kerja sama Pemda Kaltim, PT Kereta Api, PT Nuansa Cipta Coal Investment dengan Kenertec Co dan Posco Engineering & Construction Co Ltd untuk operasional pembangunan dan perawatan rel kereta api pengangkut batu bara di Kaltim.

Lalu kerja sama PT PLN dan PT Rajawali Koresia Konsorsium, Hanwha Engineering & Construction Co, Korea Western Power Co Ltd untuk pembangunan PLTU batu bara di Mulut Tambang Bangko Barat, Sumbar, dan pasokan batu bara dari PT Bukit Asam. (Andrian/Antara)

75

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2007

## RI-Korsel Lipatkan Nilai Perdagangan hingga 2012

SEOUL (SINDO) – Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) sepakat meningkatkan kerja sama bilateral yang saat ini berkembang sangat pesat di berbagai sektor. Peningkatan kerja sama ini meliputi sektor perdagangan yang ditargetkan meningkat dua kali lipat pada 2012, yang pada 2006 bernilai USD10,6 miliar. Sektor pariwisata kedua negara juga ditargetkan mampu melipatgandakan jumlah wisatawan pada 2012.

”Sejak dideklarasikan pada 2006, intensitas perkembangan kerja sama di berbagai sektor meningkat dengan

drastis dan kedua pemimpin sepakat bahwa ini momentum yang sangat baik dan ini akan terus dikembangkan,” ujar Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal se usai pertemuan bilateral antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Korsel Roo Moo-hyun seperti dilaporkan wartawan SINDO Nurmawanti dari Istana Cheong wa Dae di Seoul, Korsel, kemarin.

Dino menuturkan, pertemuan selama satu jam antara kedua pemimpin negara itu berlangsung hangat dan konstruktif.

Selain membahas hubungan bilateral, keduanya juga membicarakan masalah regional dan internasional. Hubungan bilateral Indonesia-Korsel dinilai sebagai salah satu kemitraan yang sangat pesat perkembangannya.

Sebagai langkah nyata di bidang perekonomian, kata Dino, disepakati pembentukan kelompok kerja bersama untuk mengembangkan kerja sama ekonomi (*joint task force on economic cooperation*). Kedua pemimpin negara memberikan target yang harus dipenuhi kelompok kerja ini, antara lain melipatgandakan nilai perdagangan dan investasi tahun 2012.

Target lain melipatgandakan jumlah turis, mendorong partisipasi swasta kedua belah pihak dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Selain itu, kesepakatan peningkatan kerja sama bilateral untuk eksplorasi dan eksploitasi energi di Indonesia, peningkatan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Korsel serta kerja sama bidang energi nuklir untuk tujuan damai.

”Khusus mengenai TKI, sewaktu dulu pertama kali Presiden bertemu dengan Presiden Roo, Presiden SBY meminta bantuan dari pemerintah Korsel, khususnya Presiden, untuk memperhatikan masalah TKI dan memang Presiden Roo ini tulus untuk melaksanakannya,” kata Dino.

Kelompok kerja ini, ujar Dino,

terdiri atas pejabat atau menteri perekonomian kedua negara. Di Indonesia, menteri yang bertanggung jawab melaksanakannya adalah Menko Perekonomian Boediono dan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu. Kelompok kerja ini sebelumnya telah melakukan pertemuan pada 30 April–2 Mei yang dihadiri sekitar 400 pengusaha, CEO, dan pejabat pemerintah dari kedua belah negara. ”Jadi memang ada usaha yang kuat untuk menjadikan kerja sama ekonomi dan sektor swasta sebagai motor mitra strategis ini,” tandas Dino.

Dino menambahkan, kedua negara juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama pertahanan yang disebut *joint defence logistic and industrial committee* (JDLIC). Rencananya, pembahasan awal kerja sama ini akan dilakukan bulan Agustus mendatang di Seoul oleh para pejabat pertahanan kedua negara. Kerja sama yang disepakati adalah *research and development* dan kerja sama produksi.

### Presiden SBY Prihatin

Secara khusus, Presiden SBY menyatakan prihatin atas kasus penyanderaan 23 misionaris Korsel di Afghanistan. Presiden berharap, Korsel terus mengupayakan perundingan untuk penyelesaian masalah ini. Tentang isu regional, keduanya membahas soal ASEAN dan APEC. Titik berat pembahasannya adalah pada pentingnya

kerja sama global, misalnya dalam rangka menangani masalah pemanasan global.

Satu kerja sama yang dinilai telah berjalan secara nyata dan disepakati untuk tetap ditingkatkan, tutur Dino, adalah penghutanan kembali. "Korea ini sudah mendapat alokasi 500.000 hektare untuk penghutanan kembali. Mereka sudah kerjakan 250.000 dan kita berharap ini akan terus ditingkatkan. Demikian pula adanya indikasi ketertarikan atau perhatian perusahaan-perusahaan Korsel untuk hutan tanaman industri," jelas Dino.

Sementara itu, Presiden Roo Moo-hyun dalam pembicaraan dengan Presiden SBY, ungkap Dino, menekankan diri pada sektor kerja sama yang sangat penting, yaitu di bidang ekonomi, khususnya pasokan energi dari Indonesia. Kemudian bidang pertahanan dan tenaga kerja.

"Presiden meminta agar Presiden Korsel memberikan perhatian khusus terhadap masalah TKI Indonesia di Korsel dan segera mengambil langkah yang cepat untuk memperbaiki penanganan terhadap mereka," kata Dino.

Presiden SBY, kata Dino, juga mengharapkan kerja sama antikorupsi dalam bidang *e-government*, yang disambut baik Presiden Korsel. Presiden sangat menghargai program antikorupsi yang diluncurkan oleh Presiden SBY dan memberikan penghargaan keberhasilan Indonesia dalam menyelesaikan

konflik internasional di Aceh.

Selain pertemuan bilateral, Presiden SBY mengunjungi Taman Makam Nasional (The Memorial Tower). Selesai itu, Presiden beramah tamah dengan masyarakat Indonesia di kedutaan besar (kedubes) sekaligus berdialog dengan para pekerja Indonesia di Korsel. Pada kesempatan ini, Presiden meminta para TKI tidak berpikir bahwa pemerintah tidak peduli atas nasib para TKI. "Hilangkan pemikiran bahwa pemerintah tidak memperhatikan masalah TKI," tegas Presiden.

Selesai berdialog dan bersantap siang dengan masyarakat Indonesia, Presiden SBY menjalani upacara kenegaraan di Istana Kepresidenan Seoul atau The Blue House (Cheong Wa Dae) sebelum melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Korea Roh Moo-hyun.

Turut dalam pertemuan bilateral itu, Menko Perekonomian Boediono, Menlu Hassan Wirajuda, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menbudpar Jero Wacik, Menegpora Adhyaksa Dault, dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi. Yang juga mengikuti pertemuan, Wakil Ketua DPD RI Irman Gusman, anggota Komisi I DPR RI Sjarifuddin Hasan, anggota Komisi VII DPR RI Budi Harsono, Dubes RI untuk Korea Jacob Tobing, dan Ketua Kadin Indonesia MS Hidayat. (nurmayanti)

## KESEPAKATAN KERJA SAMA RI-KORSEL

- Kerja sama PT Pertamina dengan SK Corporation untuk *revamping* kapasitas kilang dari 124.000 barel/hari menjadi 200.000 barel/hari di Dumai, Sumatera Selatan, dengan nilai investasi USD150 juta, dalam bentuk kesepakatan LoA, hingga Mei 2007, 45% sudah terlaksana.
- Kerja sama PT Pertamina dengan SK Energy untuk pemakaian merek dagang bersama guna memadukan kekuatan dalam memasarkan produksi pelumas dengan nilai USD3 juta dari pihak masing-masing untuk produksi tahun pertama dan skema promosi di Pakistan serta tahap awal dilakukan kuartal III 2007 dengan bentuk kesepakatan *head of agreement*.
- Kerja sama PT Pertamina dengan KNOG dan SK Corporation dalam operasi pada E&P Projects yang berlokasi di Shiarak Area Sumatera dengan nilai investasi USD25 juta (perkiraan untuk kegiatan eksplorasi per area) dan bentuk kesepakatan Lol atau kelanjutan dari MoU yang telah ditandatangani serta akan menggunakan tenaga kerja 70 orang.
- Kerja sama PT Pertamina (Pertagas) dengan Korea Gas Corporation (Kogas) dalam kajian pembangunan stasiun pengumpul LNG dengan lokasi Pulau Jawa dan nilai USD25 juta dolar AS serta bentuk kesepakatan Lol.
- Kerja sama PT Pertagas dengan E1, yaitu pemasaran produk *natural gas liquid* (NGL) dengan lokasi Sumatera Selatan yang bernilai USD154,7 juta dolar AS dan bentuk kesepakatan MoA serta rencana produksi propana 136 ton/hari, LPG Mix 839 ton/hari, kondensat 127 ton/hari. Tahap awal dilakukan pertengahan tahun 2009.
- Kerja sama PT Petras Indonesia dengan The Korean Konsorsium yang diwakili Innet Company untuk pembangunan pelabuhan internasional di Tanjung Api-api Sumsel dengan investasi total 600 juta dolar AS atau 150 juta/tahun serta potensi tenaga kerja 5.000 orang.
- Kerja sama PT Nuansa Cipta Coal Investment dengan Kenertec Co, Posco Engineer & Construction Co Ltd, dan Samsung Securities untuk pembangunan operasi pabrik pencairan batu bara dengan nilai investasi USD5,5 juta di Kaltim.
- Kerja sama Pemda Kaltim, PT KAI, PT Nuansa Cipta Coal Investment dengan Kenertec Co, Posco Engineering & Construction Co Ltd untuk pembangunan operasi dan perawatan rel kereta api pengangkut batubara dengan lokasi Kaltim dan nilai investasi USD 2 miliar.
- Kerja sama PT PLN dengan PT Rajawali Korea Konsorsium, Hanwha Engineering & Construction Co, Korea Western Power Co Ltd untuk pembangunan PLTU Batubara di Mulut Tambang Bangko Barat, Sumatera Selatan dengan nilai investasi USD535 juta, dan suplai batu bara dari PT Batubara Bukit Asam.

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2007

# Lee: Investor Butuh Kepastian

**JAKARTA (SINDO)** – Menteri Mentor Singapura Lee Kuan Yew menekankan pentingnya kepastian hukum di Indonesia terkait investasi luar negeri. Jika mampu menjaga kepastian hukum, Lee yakin banyak investor masuk ke Indonesia.

”Yang terpenting adalah aturan hukum dan kepercayaan. Saya pikir, mereka (investor) menginginkan kepastian. Ketika suatu perjanjian telah dicapai, jangan ubah perjanjian tersebut,” ujar Lee Kuan Yew dalam jumpa pers seusai bertemu Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin.

Menurut mantan Perdana Menteri (PM) Singapura ini, semua investor seperti AS dan Jepang akan kembali menanam saham di Tanah Air, jika Indonesia mampu menjaga kepercayaan nega-

ra-negara tersebut.

Salah satu tokoh senior Asia Tenggara itu berharap Indonesia memahami bahwa investasi asing tidak hanya untuk hari ini dan besok, melainkan bisa dalam jangka 20 tahun mendatang. Lee menjelaskan, saat ini investor lebih banyak menanam modal pada sektor perdagangan dan industri elektronik.

”Wapres Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia harus meraih (investasi) industri. Tidak hanya mengeksport mineral atau sumber daya energi, namun

menggunakannya sebagai nilai tambah bagi Indonesia,” ungkap ayah PM Singapura Lee Hsien Loong itu.

Dalam pertemuan tersebut, Lee mengaku hanya membahas masalah ekonomi bersama Kalla. Pertemuan itu tidak membahas persoalan politik. Di antara persoalan yang dibahas, adalah upaya Indonesia meningkatkan performa ekonomi dalam kurun waktu dua tahun sebelum Pemilihan Umum 2009.

Lee menilai, target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7-8% tahun depan merupakan perkiraan yang realistis, meskipun ada kenaikan harga sumber energi, komoditas, dan mineral. ”Saya pikir itu adalah perkiraan yang masuk akal. Saya melihat Indonesia dalam dua tahun ini akan mengalami

pertumbuhan ekonomi yang baik,” terang Lee.

Lee juga mengatakan, sangat penting bagi Indonesia memanfaatkan waktu lima tahun ke depan agar bisa mengejar pesaingnya di Asia Tenggara seperti Vietnam. Menurut Lee, Vietnam melaju sangat cepat karena memiliki jiwa kepemimpinan muda. Vietnam dinilai Lee meninggalkan kebijakan lama dan membuka investasi bagi semua negara.

”Mereka (Vietnam) saat ini merupakan anggota WTO (World Trade Organization). Perusahaan multinasional AS, seperti Intel Corp, menanamkan modal hingga USD1 miliar sebagai permulaan,” tutur dia.

## NERACA PERDAGANGAN INDONESIA DENGAN KORSEL

(NILAI RIBU USD)

URAIAN	2005	2006	JANUARI-MARET	PERUB(%)	
<b>TOTAL PERDAGANGAN</b>	9.954.730,0	10.569.393,4	2.133.218,4	2.415.116,6	13,21
MIGAS	5.674.279,3	5.455.034,8	1.080.556,8	1.062.768,69	-1,65
NON MIGAS	4.280.450,7	5.114.358,6	1.052.661,6	1.352.347,9	28,47
<b>EKSPOR</b>	7.085.635,8	7.693.540,9	1.735.550,8	1.767.555,2	1,84
MIGAS	4.490.209,1	4.278.954,2	1.063.949,5	867.838,9	-18,43
NON MIGAS	2.595.426,8	3.414.586,6	671.601,3	899.716,4	33,97
<b>IMPOR</b>	2.869.094,2	2.875.852,5	397.667,7	647.561,4	62,84
MIGAS	1.184.070,3	1.176.080,6	16.607,4	194.929,8	1.073,76
NON MIGAS	1.685.024,0	1.699.772,0	381.060,3	452.631,6	18,78
<b>NERACA PERDAGANGAN</b>	4.216.541,6	4.817.688,3	1.337.883,1	1.119.993,8	-16,29
MIGAS	3.306.138,8	3.102.873,7	1.047.342,1	672.909,0	-35,75
NON MIGAS	910.402,8	1.714.814,7	290.541,0	447.084,8	53,88

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Pusdata Dep. Perdagangan

Indonesia, ujar Lee, bisa tumbuh dengan cepat seperti Vietnam karena memiliki populasi yang cukup besar. Namun, hal ini dapat dicapai jika masalah buruh dan industri dapat dijalankan sesuai dengan aturan.

"Saya pikir investasi bisa tumbuh dan Indonesia dapat memulihkan nilai mata uangnya seperti sebelum krisis moneter pada 1997," imbuhnya.

#### Memuji Kalla

Dalam kesempatan itu, Lee menyampaikan pujiannya kepada Wapres Jusuf Kalla yang dianggap memahami ekonomi. Kalla disebutnya memiliki pemahaman yang jelas tentang ekonomi dunia dan posisi Indonesia, masalah yang dihadapi Indonesia, serta pende-

katan praktis untuk penyelesaian masalah. "Setiap kali saya berbicara dengannya, saya merasa optimis tentang Indonesia," tegas Lee.

Lee juga membantah kecurigaan beberapa kalangan bahwa kunjungannya ke Indonesia membawa agenda politik. Menurut dia, politik partai terlalu rumit bagi Pemerintah Singapura. "Siapa pun presiden dan menteri yang berkuasa serta proses internal di Indonesia, kami tidak ikut campur," jelas dia.

Wapres Jusuf Kalla mengakui diskusi bersama Lee berlangsung cukup produktif. Kalla juga membantah pertemuannya dengan Lee kali ini membahas masalah politik dan perjanjian kerja sama pertahanan (*defense cooperation agreement/DCA*) antara Indonesia dan Singapura. Meski demikian, Kalla menilai masalah DCA bisa

terjadi pada setiap negara. "Kita akan diskusikan dan selesaikan secara baik," imbuh Wapres.

#### Ganjalan Pengusaha

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi sependapat dengan Lee Kuan Yew. Menurutnya, kepastian hukum menjadi ganjalan pengusaha untuk menanamkan modalnya secara permanen di Indonesia. "Itu tepat sekali, Kadin (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) *kan* menjadikan itu faktor pertama dari lima masalah berusaha di Indonesia," katanya.

Dia menambahkan, keputusan institusi pemerintah di Indonesia masih berstandar ganda. Misalnya antara pemerintah pusat dan daerah yang kerap menetapkan kebijakan bertentangan. Hal itu belum

ditambah dengan kondisi politik yang multipartai. "Sekarang ini banyak yang bersuara, salah didemo, suasana belum nyaman," katanya.

Sementara Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Investasi Chris Kanter mengatakan, pemerintah dalam posisi yang tepat untuk membuat kepastian hukum. Kendati diakui masih banyak yang perlu dibenahi. "*More or less* sudah *on the track*," katanya.

Namun harus diakui, kepastian hukum tidak sepenuhnya tanggung jawab pemerintah. Menurut Crish, pemerintah sudah banyak mereformasi kebijakan terkait hukum, namun dalam pelaksanaannya melibatkan institusi di luar pemerintah. "Kita *kan* menganut *trias politica*, jadi ada bagian yang di luar kemampuan pemerintah," katanya.

(maya sofia/muhammad ma'ruf)